



IMAMAH:

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Volume 3, Nomor 2, 2025 | E-ISSN: 3026-572X

<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/imamah>

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Penerapan Pendidikan Inklusif di MTs. Darul Ulum Budi Agung Medan

Ade Irvan Margolang

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: adeirvan787@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan pendidikan inklusif di MTs Darul Ulum Budi Agung Medan. Fokus penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan kepala madrasah bersama guru dalam mengembangkan layanan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala madrasah serta dua orang guru yang terlibat langsung dalam layanan pendidikan inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah berperan dalam menyusun program kerja, memberikan motivasi, melakukan pengawasan langsung, mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik, serta melaksanakan evaluasi melalui rapat rutin dan laporan wali kelas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas, minimnya pelatihan guru, dan belum adanya program khusus dari Kementerian Agama. Namun, kepemimpinan kepala madrasah yang bersifat transformasional mampu menjaga komitmen guru untuk tetap melayani siswa inklusif secara optimal.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Madrasah, Pendidikan Inklusif

ABSTRACT

This study aims to describe the leadership of the madrasah principal in implementing inclusive education at MTs Darul Ulum Budi Agung Medan. The research focuses on the planning, implementation, and evaluation carried out by the madrasah principal and teachers in developing inclusive education services. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the madrasah principal and two teachers directly involved in inclusive education services.

The results indicate that the madrasah principal plays a role in developing work programs, providing motivation, conducting direct supervision, supporting academic and non-academic activities, and conducting evaluations through regular meetings and homeroom teacher reports. Challenges faced include limited facilities, minimal teacher training, and the absence of a specific program from the Ministry of Religious Affairs. However, the transformational leadership of the madrasah principal is able to maintain teachers' commitment to optimally serving inclusive students.

Keywords: Leadership, Madrasah Principal, Inclusive Education

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan. Konsep ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Penerapan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks madrasah yang memiliki misi membentuk karakter religius sekaligus mengembangkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik.

Kepala madrasah sebagai pemimpin memiliki peran sentral dalam keberhasilan penerapan pendidikan inklusif. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga sebagai motivator, pengawas, dan pembina guru dalam memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Melalui kepemimpinan yang tepat, madrasah dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, menerima keberagaman siswa, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak inklusif.

Dalam praktiknya, penerapan pendidikan inklusif di madrasah masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas, minimnya pelatihan guru, serta belum adanya program khusus dari Kementerian Agama menjadi hambatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, kepemimpinan kepala madrasah yang bersifat transformasional dapat menjadi faktor penggerak yang mampu mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Dengan gaya kepemimpinan yang inspiratif, kepala madrasah tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membangun motivasi dan semangat guru dalam melayani siswa inklusif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan arah dan keberhasilan penerapan program inklusif di sekolah maupun madrasah. Namun, studi mengenai kepemimpinan kepala madrasah dalam konteks pendidikan inklusif masih relatif terbatas, khususnya di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Hal ini menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengelola keberagaman siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana kepala madrasah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan pendidikan inklusif di MTs Darul Ulum Budi Agung Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan pendidikan inklusif, sekaligus mengidentifikasi kendala dan strategi yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif di madrasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan pendidikan inklusif. Lokasi penelitian adalah MTs Darul Ulum Budi Agung Medan.

Sumber data penelitian terdiri dari kepala madrasah dan dua orang guru yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka terlibat langsung dalam layanan pendidikan inklusif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan kepala madrasah dan guru terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan inklusif. Observasi dilakukan untuk

melihat langsung praktik di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, foto, serta catatan kegiatan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kepemimpinan Kepala Madrasah

Berdasarkan hasil wawancara, kepala madrasah di MTs Darul Ulum Budi Agung Medan memulai penerapan pendidikan inklusif dengan menyusun program kerja yang mencakup penerimaan siswa berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Perencanaan dilakukan melalui rapat dengan guru, penyusunan jadwal pembelajaran, serta penempatan siswa inklusif pada ruang kelas yang strategis agar mudah diawasi. Kepala madrasah juga memberi arahan kepada guru untuk memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama dalam aspek sosial dan emosional, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan madrasah.

Guru yang diwawancarai menyatakan bahwa kepala madrasah terbuka memberikan akses luas bagi semua anak untuk bersekolah, serta mendorong wali kelas dan guru BK agar terlibat langsung dalam pembinaan siswa inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kepemimpinan bukan sekadar administratif, tetapi juga strategis dalam membangun budaya madrasah yang ramah inklusif.

Pembahasan: Temuan ini sejalan dengan pendapat Siagian (2018) bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan jangka panjang. Dalam konteks pendidikan inklusif, kepala madrasah berperan sebagai perencana yang mampu memproyeksikan kebutuhan siswa, guru, dan fasilitas agar program dapat berjalan efektif. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Sunanto (2020) yang menyatakan bahwa perencanaan inklusif di sekolah sangat dipengaruhi oleh komitmen pemimpin dalam membuka akses seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Madrasah

Dalam tahap pelaksanaan, kepala madrasah tidak hanya memberi arahan, tetapi juga hadir secara langsung dalam proses pembelajaran. Berdasarkan observasi, kepala madrasah sesekali masuk ke kelas untuk melihat proses belajar siswa inklusif, sekaligus memberi motivasi kepada guru. Guru yang diwawancarai menyebutkan bahwa kepala madrasah selalu memberi dukungan, baik dalam bentuk moral maupun kebijakan, misalnya dengan tidak menuntut siswa inklusif untuk mencapai standar akademik yang sama dengan siswa reguler, melainkan menekankan pada perkembangan sesuai kemampuan masing-masing.

Selain itu, kepala madrasah mendorong guru untuk mengikuti pelatihan atau webinar mengenai pendidikan inklusif, meskipun belum ada program pelatihan formal yang difasilitasi madrasah. Kepala madrasah juga mendukung kegiatan non-akademik, misalnya mendorong siswa inklusif yang memiliki bakat olahraga untuk mengikuti perlombaan hingga tingkat nasional.

Pembahasan: Tahap pelaksanaan ini memperlihatkan adanya gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Bass (1990), pemimpin transformasional ditandai dengan kemampuannya memberi inspirasi, motivasi, serta perhatian individual kepada pengikutnya. Hal ini tampak pada dukungan kepala madrasah dalam mengembangkan potensi siswa inklusif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Penelitian serupa dilakukan

oleh Susanto (2019) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah berdampak pada meningkatnya motivasi guru dalam melayani siswa inklusif.

3. Evaluasi Kepemimpinan Kepala Madrasah

Evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat bulanan bersama guru. Kepala madrasah meminta laporan perkembangan siswa inklusif dari wali kelas dan guru BK. Jika ditemukan kendala, seperti kesulitan siswa dalam bersosialisasi atau konflik dengan teman sebaya, kepala madrasah bersama guru mencari solusi, misalnya melalui pendekatan konseling. Selain itu, komunikasi dengan orang tua juga menjadi bagian penting dari evaluasi. Wali kelas ditugaskan untuk memberikan laporan berkala kepada orang tua mengenai perkembangan akademik dan sosial anak.

Kepala madrasah menekankan bahwa setiap evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi harus menghasilkan langkah perbaikan. Misalnya, jika ada siswa inklusif yang kesulitan mengikuti pelajaran matematika, guru diberi arahan untuk menggunakan metode visual atau praktik langsung.

Pembahasan: Evaluasi ini mencerminkan fungsi pengendalian dalam manajemen pendidikan. Arikunto (2017) menyebutkan bahwa evaluasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi berperan penting dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa inklusif. Penelitian Syahputra (2021) juga menguatkan bahwa evaluasi berkesinambungan di sekolah inklusif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengurangi kendala adaptasi siswa.

4. Kendala dan Upaya Pemecahan

Guru dan kepala madrasah mengakui bahwa keterbatasan fasilitas merupakan kendala utama. Madrasah belum memiliki ruang khusus atau media pembelajaran adaptif bagi siswa inklusif. Selain itu, sebagian besar guru belum pernah mengikuti pelatihan khusus pendidikan inklusif, sehingga penanganan siswa lebih banyak berdasarkan pengalaman pribadi. Hambatan lain adalah belum adanya program inklusif yang difasilitasi Kementerian Agama, sehingga madrasah berjalan mandiri dalam mengembangkan layanan inklusif.

Namun, kepala madrasah berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Guru didorong untuk kreatif menggunakan media pembelajaran sederhana. Kepala madrasah juga membangun komunikasi erat dengan orang tua agar dapat bersama-sama mendampingi perkembangan anak. Selain itu, motivasi terus diberikan kepada guru agar tetap berkomitmen melayani siswa inklusif meski dengan segala keterbatasan.

Pembahasan: Kendala yang dihadapi di MTs Darul Ulum Budi Agung Medan sejalan dengan hasil penelitian Sunanto (2020) yang menemukan bahwa fasilitas dan pelatihan guru merupakan dua masalah besar dalam implementasi pendidikan inklusif. Namun, gaya kepemimpinan kepala madrasah yang transformasional mampu menjaga semangat guru agar tetap konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal struktur, tetapi juga kemampuan memberi teladan, motivasi, dan dukungan emosional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan kepala madrasah di MTs Darul Ulum Budi Agung Medan berperan penting dalam penerapan pendidikan inklusif. Peran tersebut mencakup:

1. Perencanaan, kepala madrasah menyusun program yang ramah inklusif dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi siswa berkebutuhan khusus. Perencanaan dilakukan melalui penempatan siswa di ruang kelas yang strategis, pengarahan kepada guru, serta komunikasi dengan orang tua.
2. Pelaksanaan, kepala madrasah menunjukkan kepemimpinan transformasional dengan memberi motivasi kepada guru, mengawasi langsung proses pembelajaran, mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, serta mendorong guru mencari pelatihan tentang pendidikan inklusif.
3. Evaluasi, kepala madrasah melaksanakan evaluasi berkesinambungan melalui rapat rutin, laporan perkembangan siswa dari wali kelas, serta komunikasi intensif dengan orang tua. Evaluasi berorientasi pada perbaikan strategi pembelajaran.

Kendala utama penerapan pendidikan inklusif adalah keterbatasan fasilitas, minimnya pelatihan guru, serta belum adanya program khusus dari Kementerian Agama. Namun, keterbatasan ini dapat diatasi melalui motivasi, komunikasi, dan dukungan yang diberikan kepala madrasah. Dengan demikian, gaya kepemimpinan transformasional kepala madrasah menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan mendukung perkembangan semua peserta didik.

Saran

1. Bagi Madrasah, perlu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penggunaan fasilitas sederhana untuk mendukung pembelajaran siswa inklusif. Selain itu, madrasah perlu mengadakan program pelatihan internal agar guru semakin memahami strategi pembelajaran inklusif.
2. Bagi Guru, guru diharapkan lebih proaktif mencari informasi, pelatihan, atau webinar tentang pendidikan inklusif, serta membangun kolaborasi dengan sesama guru untuk berbagi pengalaman dalam menangani siswa berkebutuhan khusus.
3. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama), perlu menyusun program khusus dan menyediakan fasilitas pendukung untuk madrasah penyelenggara pendidikan inklusif, agar layanan pendidikan setara dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat meneliti aspek lain, seperti peran guru BK, peran orang tua, atau efektivitas metode pembelajaran tertentu dalam konteks pendidikan inklusif di madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *PROSEDUR PENELITIAN: SUATU PENDEKATAN PRAKTIK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bass, B. M. (1990). FROM TRANSACTIONAL TO TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP: Learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19–31. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)
- Moleong, L. J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. BANDUNG: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. P. (2018). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunanto, J. (2020). TANTANGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 16(2), 45–56.
- Susanto, A. (2019). GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN INKLUSIF. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 55–70.

- Syahputra, R. (2021). EVALUASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH INKLUSIF: PENDEKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(2), 112–123.
- Tilaar, H. A. R. (2009). KEBIJAKAN PENDIDIKAN: PENGANTAR UNTUK MEMAHAMI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.